

MANIFESTASI PANCASILA MELALUI TRISAKTI SEBAGAI PEDOMAN MEWUJUDKAN AMANAT PENDERITAAN RAKYAT

CHANDRA SETIAWAN

Fakultas Bisnis Universitas Presiden (President University)

chandra@president.ac.id

Abstrak

Tulisan ini menelaah manifestasi Pancasila melalui Ajaran Trisakti dari Sukarno guna dijadikan pedoman mewujudkan amanat penderitaan rakyat. Tulisan ini menjelaskan bukti empiris bagaimana kehidupan politik, ekonomi dan budaya yang dicapai bangsa Indonesia. Hasilnya terdapat kemiskinan, ketidakadilan, kehilangan jati diri seperti korupsi yang cenderung meningkat. Kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan masih memerlukan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh negara Indonesia demi tercapainya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Perlu penyempurnaan sistem pemilu, harus beralih dari paradigma ekonomi neo liberal ke sosialisme ekonomi Pancasila, memperkuat koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, mengupayakan kedaulatan pangan. Melakukan transformasi mental-karakter dengan orientasi menumbuhkan manusia Indonesia yang berkarakter, kreatif, cakap tata kelola, dan berjiwa merdeka. Pemanfaatan sumber daya alam dan energy sebagai pokok kemakmuran rakyat. Perkuat Sektor Pertanian, mengurangi impor bahan pangan, menguatkan industri Farmasi, peralatan Kesehatan; Meningkatkan literasi digital pemuda untuk kepentingan yang produktif; Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja Indonesia melalui training, Pendidikan vokasi. Perkuat *nation & character building*, nasionalisme, cinta tanah air secara tulus. Merayakan kebhinnekaan dan meningkatkan persatuan sebagai bangsa, bersinergi tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Terciptanya kehidupan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong dan meningkatkan partisipasi rakyat di dalam membayar pajak.

Kata Kunci: *pancasila, trisakti, kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, berkepribadian kebudayaan*

Pendahuluan

Sukarno dalam pidato Lahirnya Pancasila mengatakan:” *Jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia Merdeka itu perjuangan kita telah berakhir. Tidak! Bahkan saya berkata: Di – dalam Indonesia Merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus, Nanti kita, bersama-sama, sebagai bangsa yang bersatu padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Panca Sila.*”

Pidato di atas mengisyaratkan kepada bangsa Indonesia untuk tidak pernah berhenti berjuang di dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila demi tercapainya mewujudkan amanat penderitaan rakyat mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sebagaimana yang telah digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Ideologi Negara: cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan Bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (Kaelan: 2020, p.27)

a. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.

b. Oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamankan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Cakupan Pancasila sebagai ideologi meliputi: Bidang Politik, pertahanan dan keamanan, bidang Sosial, bidang Kebudayaan dan bidang Keagamaan.

Dari pengertian ideologi negara dan cakupan Pancasila sebagai ideologi negara, maka manifestasi Pancasila melalui Trisakti yakni mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia khususnya dalam bidang politik, ekonomi dan kebudayaan menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat senantiasa menjadi tantangan dari jaman ke jaman dan masih terus berproses serta merupakan perjuangan bangsa Indonesia guna mewujudkan amanat penderitaan rakyat.

Melalui pidato 'Tahun Vivere Pericoloso', Soekarno merilis pesan ke level kawasan, khususnya setiap negara Asia-Afrika tentang spirit Konferensi Asia-Afrika Bandung (1955), yakni "...keharusan setiap negara Asia-Afrika untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam ekonomi, bebas dalam politik, berkepribadian dalam kebudayaan."

Dari sini lahir gagasan Presiden Sukarno tentang Strategi Trisakti: 'Berdikari bidang ekonomi, berdaulat (merdeka) bidang politik, dan berkepribadian bidang kebudayaan.'

Jati diri bangsa Indonesia ialah nilai-nilai asli dan universal Pancasila. Presiden Sukarno berpidato pada Peringatan Lahir Pancasila, filosofische grondslag Indonesia, 1 Juni 1964 di Kota Yogyakarta: "Aku tidak mendapat wahju; Aku bukan Nabi; Aku sekedar menggali Pantja Sila di Bumi Indonesia sendiri!" (Kedaulatan Rakjat, Selasa 1 Juni 1964).

Sukarno pernah mengatakan "untuk membangun satu negara yang demokratis, maka satu ekonomi yang merdeka harus dibangun. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan". Berdikari ekonomi sendiri secara teoretis dimaknai ekonomi yang dihasilkan kekuatan sendiri, baik dari sumber bahan, tenaga, keahlian, hingga sampai pada persoalan produksi, distribusi, dan pasar. Oleh karena itu berdikari ekonomi memiliki dasar kerakyatan yakni percaya dengan kekuatan bangsa sendiri untuk mengelola ekonomi. Kemudian dalam mewujudkan kepribadian bangsa yang lahir dari akar kebudayaan sendiri, bukan dari kebudayaan bangsa lain. Kepribadian tersebut hendaknya kemudian mewujudkan menjadi mentalitas, pengetahuan, bahasa, tradisi, dan pola hidup yang membedakan identitas bangsa Indonesia dengan lainnya. Prinsip ketiga ini dilakukan Sukarno sebagai upaya membendung kebudayaan asing seperti liberalisme dan kapitalisme yang bisa menciptakan kolonial baru, sekaligus digunakan Sukarno untuk mengubah susunan masyarakat feodal yang telah bersemayam 350 tahun di Indonesia.

Mengapa Trisakti Bung Karno penting diwujudkan? Saat ini kita menghadapi isu-isu kebangsaan strategis antara lain, Indonesia belum berdaulat secara penuh dalam bidang politik, sumber kekayaan alam yang belum terkelola secara baik, ideologi bangsa yang saat ini mulai tergerus dengan adanya rongrongan terhadap Pancasila dan UUD 1945, sosial budaya yang mulai luntur dengan berbagai pengaruh budaya asing yang dapat merusak budaya bangsa Indonesia dan pertahanan keamanan yang belum sepenuhnya kokoh karena degradasi nasionalisme.

Berdault dalam Bidang Politik masih jauh dari harapan Sukarno seperti masih banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Masih berlaku Undang-Undang yang memberikan keleluasaan pelaku usaha menguasai bisnis dari hulu ke hilir, seperti pada sektor perunggasan, kepemilikan lahan sawit yang dikuasai pengusaha besar dan asing. Penguasaan negara melalui Badan usaha milik negara yang tidak sampai lima persen mengakibatkan pemerintah tidak dapat dengan mudah mengendalikan harga, sehingga rakyat kecil mengalami kesulitan karena harga-harga mengalami kenaikan secara signifikan. Manurung, A.D.R. & Kanumuyoso, B. (2021) mengutip bahwa Indeks demokrasi tahun 2020, Indonesia menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia. Kemudian dikatakan bahwa Sistem Pemilihan Umum memiliki kelemahan mendasar yang lebih dikendalikan para pemilik kapital daripada mengedepankan figur yang cerdas dan merupakan representasi rakyat.

Hal-hal lain seperti penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya yang menurut penyelidikan Komisi Hak Asasi Manusia terdapat dugaan kuat terjadi pelanggaran HAM Berat di masa lalu tidak dilakukan penegakan hukum. Demikian juga pemerintah terkesan tidak berdaya terhadap kekuatan-kekuatan kelompok masyarakat tertentu yang berbasis agama (mayoritas) anti hukum dan bertindak anti keberagaman, seperti penolakan pendirian tempat ibadah, dan perguruan tinggi. Pemerintah dan DPR RI juga kurang melibatkan partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan dan Undang-Undang serta tidak melakukan analisis dampak secara menyeluruh.

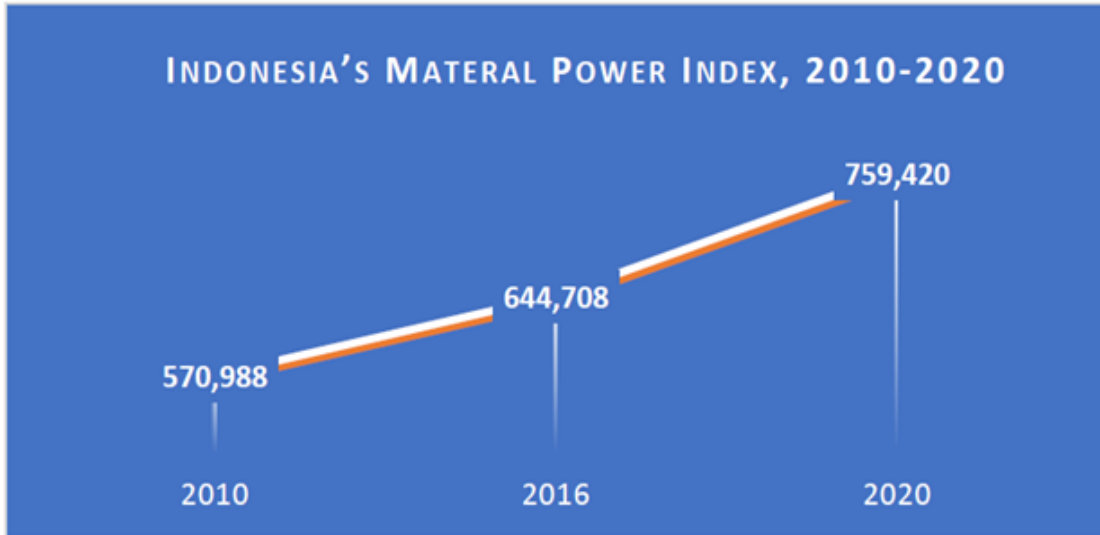
Data-data di bawah ini akan memperlihatkan bahwa sistem ekonomi yang berjalan tidak lah sepenuhnya merupakan manifestasi dari Pancasila seperti keadilan sosial karena angka kemiskinan, jurang kaya miskin yang semakin menganga dan adanya penguasaan ekonomi oleh kaum oligark.

Tabel 1. Material Power Index (MPI) Indonesia dan Beberapa Negara Terpilih Tahun 2020

| <i>Tabun 2020</i> | <i>Indonesia</i> | <i>Singapura</i> | <i>Filipina</i> | <i>Korea Selatan</i> | <i>Amerika Serikat</i> |
|--|------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| <i>Total Asset 40 orang terkaya (Miliar US\$)</i> | 126,88 | 198,76 | 76,72 | 145,91 | 2.318 |
| <i>Oligarchic Scale (Miliar US\$)</i> | 3,17 | 4,97 | 1,91 | 3,64 | 57,96 |
| <i>Kekayaan orang terkaya nomor 1 (Miliar US\$)</i> | 38,8 | 23 | 16,6 | 12,5 | 201 |
| <i>Kekayaan orang terkaya nomor 40 (Miliar US\$)</i> | 0,68 | 1,05 | 0,29 | 1,21 | 18,1 |
| <i>PDB PerKapita (US\$)</i> | 3.869 | 59.797 | 3.298 | 31.489 | 63.643 |
| <i>PDB (Miliar US\$)</i> | 1.058 | 340 | 361,5 | 1.631 | 20.940 |
| <i>Oligarchy Intensity</i> | 11,99 | 58,46 | 21,22 | 8,95 | 11,07 |
| <i>Material Power Index</i> | 819.850 | 157.801 | 30.136 | 1.106.049 | 969.321 |

(Sumber: Forbes, World Bank dan Model Perhitungan MPI)

Nilai MPI Indonesia (2020) seperti dapat dilihat pada Tabel 1 lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, yakni berada pada angka 819.850. Ini menunjukkan bahwa rata-rata aset yang dikuasai oleh 40 orang terkaya di Indonesia setara dengan lebih 800.000 kali lipat aset yang dimiliki oleh rata-rata orang di Indonesia. Berdasar data yang dihimpun dari Forbes dan Worldbank ini, nilai MPI Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura dan Filipina.



Gambar 1 Perubahan Indeks Kekuatan Material di Indonesia, 2010-2020
(Jeffrey A. Winters, 2021, p. 12.)

Hasil yang terdapat pada gambar 1 di atas dijelaskan oleh Winters (2021) pada halaman 12 tulisannya sebagai berikut dihitung dengan membagi kekayaan rata-rata dari 40 orang terkaya Indonesia (tersedia setiap tahun dari Forbes) dengan posisi kekayaan rata-rata penduduk (menggunakan PDB per kapita sebagai proxy). Hasilnya menunjukkan bahwa kesenjangan kekayaan-kekuatan yang sudah besar di Indonesia pada tahun 2010 telah tumbuh pesat selama dekade terakhir. Rata-rata oligark teratas di Indonesia memiliki sekitar 570.988 kali kekuatan kekayaan rata-rata warga Negara pada tahun 2010. Jumlah ini naik menjadi 759.420 kali lipat pada tahun 2020, atau meningkat 33%. Ini berarti konsentrasi kekayaan di kalangan oligark meningkat jauh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Data-data ini jelas membuktikan bahwa kecenderungan pemusatan penguasaan sumber daya ekonomi di Indonesia masih terus menerus berlangsung. Praktik penguasaan sumber daya seperti ini jelas akan berdampak pada munculnya kemungkinan-kemungkinan ketimpangan ekosistem dunia usaha melalui konsentrasi sumber daya modal. Konsekuensi lebih lanjut, hal tersebut dapat mempengaruhi pembentukan harga, penghambat wirausaha baru, persaingan usaha tidak sehat, dan terakhir dapat mengganggu stabilitas politik nasional akibat ketimpangan yang parah.

Pada Tabel 2 yang merupakan indikator lain, *Wealth Concentration Ratio*, memberikan gambaran tentang Negara mana yang memiliki konsentrasi kekayaan yang ekstrim di bagian atas. Dihitung dengan membandingkan median dan kekayaan rata-rata suatu Negara dari data yang dikumpulkan oleh Credit Suisse. Kekayaan median dalam masyarakat adalah titik

tengah dalam populasi. Separuh orang dewasa lebih kaya dan separuh lagi lebih miskin. Kekayaan rata-rata adalah total kekayaan pada suatu Negara dibagi dengan jumlah orang dewasa. Untuk semua 171 negara dalam kumpulan data Credit Suisse, rata-rata lebih tinggi dari median. Ini karena konsentrasi kekayaan yang berada di sekitar mereka yang di atas pada setiap Negara membuat rata-rata menjadi lebih tinggi. Tabel 2 memperlihatkan Indonesia menduduki peringkat ke-8 dunia dengan rasio 5,3 berbanding rata-rata dunia 3,0 (Winters: 2021, p.12).

Tabel 2 Weath Concentration Ratios Paling Tinggi di Dunia, 2019

| Rank | Country | Median Wealth (US\$) | Average Wealth (US\$) | Wealth Concentration Ratio |
|----------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Netherlands | 31,057 | 279,077 | 9.0 |
| 2 | Russia | 3,683 | 27,381 | 7.4 |
| 3 | Ukraine | 1,223 | 8,792 | 7.2 |
| 4 | United States | 65,904 | 432,365 | 6.6 |
| 5 | Sweden | 41,582 | 265,260 | 6.4 |
| 6 | Thailand | 3,526 | 21,853 | 6.2 |
| 7 | Germany | 35,313 | 216,654 | 6.1 |
| 8 | Indonesia | 1,977 | 10,545 | 5.3 |
| 9 | Denmark | 58,784 | 284,022 | 4.8 |
| 10 | India | 3,042 | 14,569 | 4.8 |
| ** | Average | | | 3.0 |

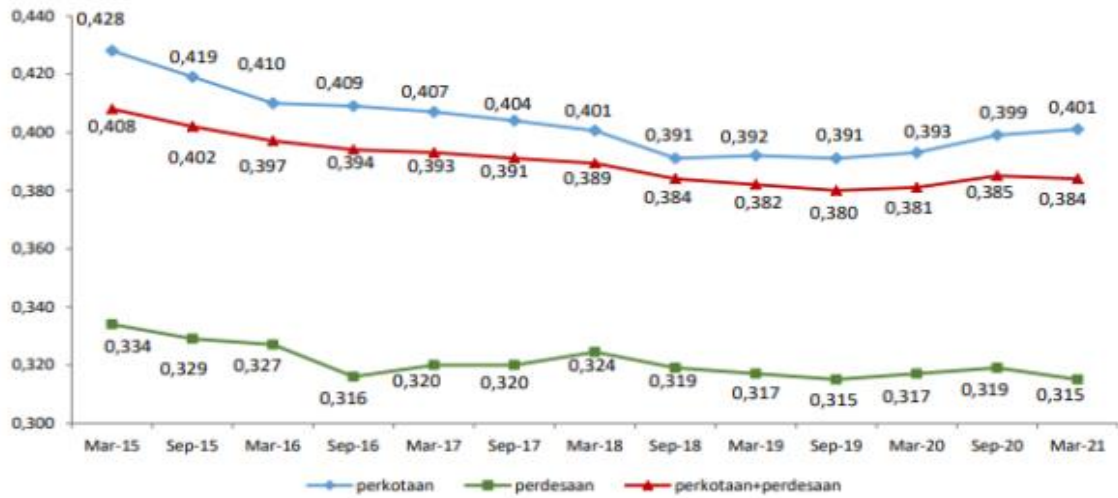
Source: Credit Suisse Global Wealth Databook, 2019.
(Jeffrey A. Winters, 2021, p. 13.)

Sistem ekonomi secara tak terelakkan menghasilkan oligark yang dapat dengan mudah mengubah kuasa kekayaan menjadi kuasa politik, dan mereka yang memiliki insentif kuat untuk melakukannya tak lain adalah demi mempertahankan kekayaan mereka (Jeffrey A. Winters, 2021).

Nampak sekali Kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi sebagai pengamalan Pancasila masih menghadapi tantangan dan tidak seperti yang dicita-citakan, realitas ekonomi Indonesia bukanlah menggunakan sistem ekonomi Pancasila, tetapi ekonomi pasar liberal yang menghasilkan jurang kaya miskin semakin lebar. Hal ini akan tergambar lebih jelas lagi ketimpangan yang telah terjadi dalam lima tahun terakhir seperti yang dapat dilihat rasio gini yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Gambar 2 di bawah ini.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir nyatanya belum beriringan dengan pemerataan distribusi pendapatan secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi selama 15 tahun di Indonesia memang telah membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan kelas menengah yang berkembang. Akan tetapi, pertumbuhan tersebut hanya menguntungkan 20% penduduk terkaya, sementara sisanya tertinggal dalam mengakses dan menikmati hasil pembangunan. Ketimpangan ekonomi antar lapisan masyarakat tercatat sempat meningkat selama beberapa tahun, meskipun kemudian stagnan dan sedikit membaik

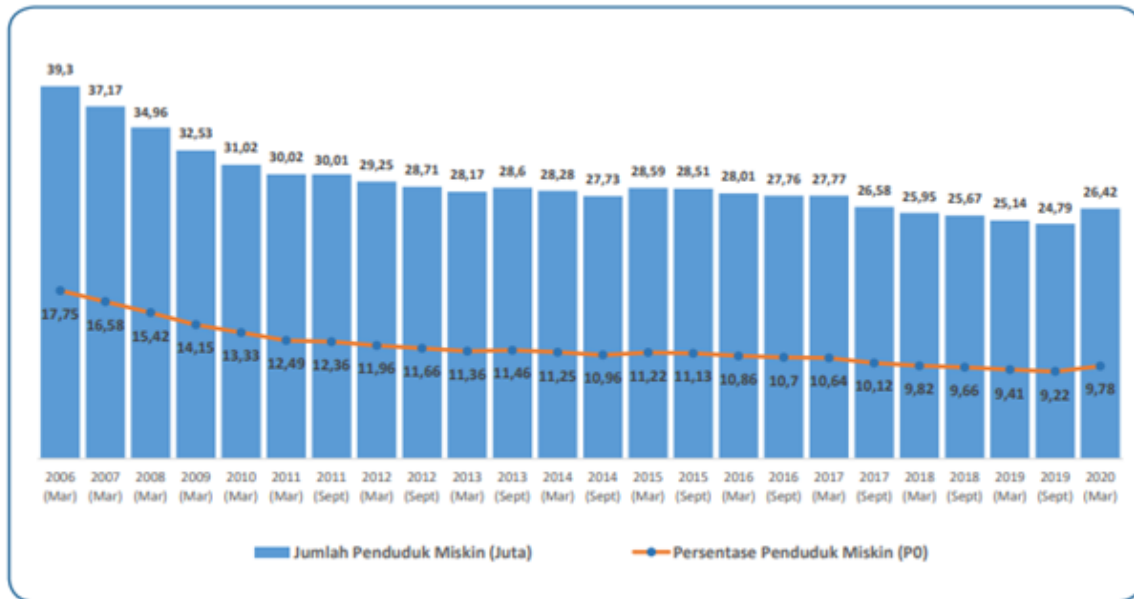
dalam dua tahun terakhir. Salah satu yang biasa dipakai adalah rasio gini, suatu ukuran pemerataan yang bernilai antara 0 dan 1



Gambar 2 Grafik Perkembangan Tingkat Koefisien Gini Indonesia 2015-2021 (Sumber: BPS, 2021)

Seperti disebut di atas, terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, diikuti kenaikan PDB per kapita selama beberapa tahun terakhir. Tingkat pertumbuhan itu telah pula memberikan dampak kepada seluruh kelompok ekonomi. Kelompok miskin maupun kaya secara nyata menikmati peningkatan pengeluaran. Namun, peningkatan pengeluaran tidak merata untuk seluruh kelompok masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) mencatat rasio gini (gini ratio) nasional pada Maret 2022 sebesar 0,403, naik dibanding Gini Rasio September 2020 mencapai 0,398 dan Gini Rasio Maret 2021 sebesar 0,401.

Tabel 3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 2006 – Maret 2020



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Tabel 4 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau, Maret 2020

| Pulau | Persentase Penduduk Miskin | | | Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) | | |
|------------------------|----------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Sumatera | 8,39 | 11,01 | 9,87 | 2 154,41 | 3 683,06 | 5 837,47 |
| Jawa | 7,48 | 12,64 | 9,24 | 7 493,53 | 6 559,28 | 14 052,81 |
| Bali dan Nusa Tenggara | 8,56 | 17,69 | 13,55 | 582,20 | 1 450,63 | 2 032,83 |
| Kalimantan | 4,35 | 7,13 | 5,81 | 345,36 | 624,28 | 969,64 |
| Sulawesi | 5,63 | 13,12 | 10,10 | 452,28 | 1 554,50 | 2 006,78 |
| Maluku dan Papua | 5,25 | 28,15 | 20,34 | 134,18 | 1 390,31 | 1 524,49 |
| Indonesia | 7,38 | 12,82 | 9,78 | 11 161,96 | 15 262,06 | 26 424,02 |

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020

Dari Tabel 3 dan Tabel 4 jumlah dan persentasi penduduk miskin 2006- Maret 2020 menunjukkan setidaknya dalam 5 (lima) tahun terakhir terdapat kecenderungan mengalami penurunan yakni posisi Maret 2008 persentase penduduk miskin 9,82% dan pada tahun 2019 menurun menjadi 9,22% atau menurun sebesar 0,6%, tapi dengan adanya pandemi Covid-19 cenderung meningkat lagi posisi Maret 2020 mencapai 9,78% atau setara 26, 42 juta penduduk miskin. Sedangkan sebaran penduduk miskin menurut pulau

pada Maret 2020 menunjukkan pulau Jawa menduduki posisi paling besar, disusul Sumatera, Bali dan NTT, Sulawesi, Maluku dan Papua, dan Kalimantan.

Ekonomi Sangat Liberal

Dari UU No. 1 tahun 1967 hingga UU no. 25 tahun 2007 terlihat sangat jelas kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, yang secara sistematis dan konsisten terus diarahkan pada kebebasan atau liberalisasi yang sebesar mungkin.

Mekanisme pasar diperankan semakin besar, dan pada akhirnya Indonesia praktis tidak mengenal barang dan jasa publik, sehingga semakin jauh dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kebijakan ekonomi Indonesia dikendalikan oleh kekuatan korporasi AS, dengan dukungan sepenuhnya oleh pemerintah AS dan lembaga-lembaga internasional (Kwik Kian Gie, 2016).

Jebakan Utang (Debt Trap)

Tabel 5 Perkembangan *OutStanding* Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Mata Uang Asli | | | | | |
| - IDR (triliun) | 2019,2 | 2346,9 | 2608,8 | 2971,5 | 3289,8 |
| - USD (miliar) | 80,5 | 87,9 | 93,7 | 93,0 | 99,2 |
| - JPY (miliar) | 2063,1 | 2021,5 | 1976,1 | 2048,9 | 1967,4 |
| - EUR (miliar) | 8,9 | 10,1 | 11,9 | 14,2 | 16,1 |
| - Lainnya | | | | | |
| Ekuivalen triliun rupiah | | | | | |
| - IDR | 2019,2 | 2346,9 | 2608,8 | 2971,5 | 3289,8 |
| - USD | 1081,1 | 1190,8 | 1356,9 | 1292,9 | 1418,4 |
| - JPY | 238,1 | 243,0 | 259,1 | 262,2 | 261,3 |
| - EUR | 126,5 | 163,7 | 197,7 | 221,6 | 258,9 |
| - Lainnya | 50,6 | 50,4 | 43,8 | 38,4 | 35,7 |
| Jumlah | 3515,5 | 3994,8 | 4466,2 | 4786,5 | 5264,1 |

*Realisasi s.d Juni 2020

Sumber: Kementerian Keuangan

Dari tabel 5 di atas menunjukkan dari tahun ke tahun mulai tahun 2016 hingga tahun 2020 utang Pemerintah terus meningkat sehingga sudah mencapai lebih dari Rp5.000 triliun, dan diperkirakan pada tahun 2021 tambahan utang sekitar Rp1.000 triliun, dengan demikian pada akhir tahun 2021 akan mencapai lebih dari Rp6.000 triliun. Suatu jumlah yang cukup mengkhawatirkan sementara penerimaan dari pajak cenderung mengalami penurunan. Besaran utang ini menggambarkan dari aspek pendanaan pembangunan Indonesia di Indonesia belum dapat mandiri dari penerimaan pajak atau pendapatan dividen dari BUMN dan sumber Penerimaan Bukan Pajak Lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa kewajiban warga negara unntuk membayar pajak masih perlu ditingkatkan. Demikian juga

pengelolaan sumber daya belum optimal, tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki Indonesia. Dengan demikian, masih merupakan pekerjaan rumah (PR) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri, terlebih lagi dampak dari pandemi Covid-19. Negara belum mampu menguasai kebutuhan pangan seperti minyak goreng contohnya, dan demikian pula dalam penguasaan segala kekayaan dan aset nasional strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Dalam Implementasi ajaran Trisakti yang ketiga yakni Berkepribadian di Bidang Kebudayaan menunjukkan keprihatinan yang mendalam, terutama dalam hal korupsi. Di tahun 2022 ini disamping beberapa kepala daerah, pelaku usaha yang terlibat korupsi, juga korupsi dilakukan pimpinan perguruan tinggi. Pada tahun 2022 ini menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) sebesar 3,93 poin meningkat 1,28% dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 3,88 poin.

Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia masih tertinggal dan berada di urutan ke 50 dari 141 negara, masih dibawah Malaysia dan Thailand hal ini disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (liputan 6.com, 25 Maret 2021).

Persoalan utama bangsa hari ini yaitu kemiskinan dan penguasaan kekayaan oleh sekelompok orang dan tidak berdayanya pemerintah di dalam menghadapi kaum oligark yang menjauhkan bangsa dari nilai-nilai Pancasila. Maka dengan adanya, penciptaan Trisakti sebenarnya adalah cara untuk membentuk manusia-manusia Indonesia yang baru sesuai dengan Pancasila guna mewujudkan Amanat Penderitaan Rakyat. Adapun konsep pembangunan karakter manusia yang digagas oleh Sukarno sendiri bermakna agar manusia Indonesia sendiri menjadi figur yang berkarakter kuat dalam mengatasi segala macam permasalahan. Berdaulat secara politik jika disambungkan dengan pembentukan karakter bangsa dianalogikan sebagai bentuk penghapusan mental terjajah maupun inferior yang selama ini melekat secara inheren dalam pembentukan manusia Hindia Belanda dalam skema kolonialisme Belanda.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan library riset (Studi Kepustakaan), penelitian ini termasuk jenis kualitatif dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka, membaca, memahami, mencatat sesuai dengan topik penelitian, kemudian menganalisis data empiris. (Moleong, 2008), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dengan berbagai karakteristik khas yang dimiliki, penelitian kualitatif memiliki kekhasan dan menjadi berbeda dengan penelitian kuantitatif. Adapun tahapan yang dilalui, yaitu (1) mengumpulkan bahan yang penelitian, (2) membaca bahan pustaka, (3) memahami konten tema penelitian, (4) membuat catatan penelitian, (5) mengelola catatan hasil penelitian, dan (6) menyimpulkan bahan yang akan dibahas dalam penelitian itu.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah mengurai dan menjelaskan gagasan Sukarno tentang Trisakti, menganalisis kondisi nyata yang dialami bangsa Indonesia. Solusi

dengan memanifestasi Pancasila melalui Trisakti dengan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pembangunan yang berorientasi kemandirian bangsa Kemandirian telah dinyatakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai satu bagian dari tujuan negara ini dilahirkan. Berdaulat di bidang politik memerlukan pemimpin yang memegang Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi, dan Spiritualitas Bangsa. Keberanian melahirkan kebijakan yang tegas dalam segala bentuk dan manifestasi deideologisasi Pancasila, sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan bernafaskan Pancasila sebagai sumber dari segala tertib hukum, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan asing, mengembangkan *Nation and Character Building*, menguatkan peran masyarakat sipil, penyelesaian masalah pelanggaran HAM Berat masa lalu dan lain sebagainya (Manurung, A.D.R. & Kanumuyoso, B. (2021).

Dinamika yang terjadi pada geopolitik global, dengan adanya blok Barat dan Amerika dan Blok Rusia, Tiongkok menghadapi krisis pangan dan energi akibat perang Rusia dan Ukraina yang terus berkobar, dan belum dipastikan kapan akan berakhir, maka negara dituntut untuk berdaulat dan semakin cermat dan cerdas di dalam mengelola arus perdagangan barang dan jasa, hutang luar negeri, serta investasi yang terjadi. Seharusnya terdapat nilai tambah yang dihasilkan darinya guna meningkatkan kemandirian ekonomi, atau jangan sampai terjadi justru meningkatkan ketergantungan bangsa Indonesia terhadap bangsa lain. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki daya tawar tinggi dan mampu bernegosiasi dalam setiap perjanjian/hubungan ekonomi pada tingkat internasional maupun dalam negeri dengan mengutamakan kepentingan nasional. Di sisi lain, pembangunan nasional juga harus secara konsisten menumbuhkan *self-sufficiency, self-confidence, dan self-management* masyarakat, khususnya golongan ekonomi kecil.

Dengan demikian, Pemerintah harus selalu mengupayakan agar proyek-proyek yang dilaksanakan untuk itu dapat tepat guna dan berkesinambungan dengan memperhatikan berbagai dinamika perekonomian yang ada. Terhadap sektor usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara Pemerintah adalah pemegang mandat kedaulatan rakyat. Rakyat adalah awal dan akhir dalam kehidupan bernegara, sehingga melayani kebutuhan dasarnya merupakan mandat kepada Pemerintah sejak Indonesia merdeka. Jika bidang usaha yang vital bagi kebutuhan hajat hidup rakyat dikuasai oleh swasta, kemampuan kontrol pemerintah terhadap pengelolaan dan produksi tidak maksimal. Pada akhirnya, rakyat akan menjadi korban. Konsep tersebut sejalan dengan amanat Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Jika amanat konstitusi dijalankan, maka Sistem Ekonomi Pancasila dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena kontrol negara atas pengelolaan sektor usaha tersebut akan digunakan untuk kepentingan rakyat.

Dalam hal kemandirian ekonomi Indonesia dipandang sebagai negara yang memiliki potensi ekonomi yang besar. Sebagai negara berpendapatan menengah dan anggota G20,

Indonesia merupakan negara dengan GDP nominal tertinggi ke-15 atau GDP (PPP) tertinggi ke-7. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara tertinggi ke-4 dalam hal jumlah penduduk di dunia. Sejak keluar dari masa krisis ekonomi 1997-1998, pembangunan ekonomi Indonesia menunjukkan angka peningkatan dan dinilai cukup berhasil. Hal tersebut ditunjukkan dengan indikator makro-ekonomi berupa angka pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Meskipun perlahan, kecenderungan pertumbuhan ekonomi terus membaik dan sempat beberapa kali melampaui angka enam persen. Namun demikian, sejalan dengan ketidakpastian dan melambatnya perbaikan ekonomi global, terjadi pula pelambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semenjak tahun 2014 hingga sebelum pandemi terjadi, pertumbuhan ekonomi berikutnya hanya pada kisaran angka lima persen. Namun, pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen tersebut belum diikuti pemerataan, terbukti gini rasio cenderung meningkat.

Dalam mengatasi kemiskinan, bahkan bantuan pandemi covid-19 selama ini selalu menghadapi kondisi data yang kurang valid. Dengan data tersebut, maka intervensi bantuan dan program pembangunan untuk mengatasi kemiskinan dan atau warga terdampak covid-19 jadi kurang tepat sasaran dan manfaat.

Kesimpulan dan Saran

Manifestasi Pancasila melalui gagasan Sukarno Trisakti dari kondisi nyata yang dicapai bangsa Indonesia baik dalam bidang politik, ekonomi dan budaya belum lah optimal ditandai masih banyak jumlah rakyat miskin, kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar, budaya korupsi yang tidak bisa dikurangi, masih terdapat gangguan serius terhadap jati diri bangsa yang merdeka, berdaulat dan makmur.

Saran Untuk Mengatasi Kesenjangan, Meningkatkan Keadilan dan Kemandirian Ekonomi demi mewujudkan amanat penderitaan rakyat antara lain sebagai berikut:

- Pemerataan pembangunan (mengurangi kesenjangan), beralih dari paradigma ekonomi neo liberal ke sosialisme ekonomi Pancasila.
- Perkuat Peran UMKM (pemberdayaan, pelibatan, dan perlindungan), dan sektor Pariwisata
- Pemanfaatan sumber daya alam dan energy sebagai pokok kemakmuran rakyat.
- Perkuat Sektor Pertanian, kurangi impor bahan pangan: gula, buah-buahan, sayur-sayuran seperti bawang putih (hampir 100% impor).
- Perkuat Industri Farmasi, peralatan Kesehatan
- Meningkatkan literasi digital pemuda untuk kepentingan yang produktif
- Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja Indonesia melalui training, Pendidikan vokasi.
- Perkuat nation & character building, nasionalisme, cinta tanah air secara tulus.
- Merayakan kebhinnekaan dan meningkatkan persatuan sebagai bangsa, bersinergi tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.
- Terciptanya kehidupan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong
- Meningkatkan partisipasi rakyat di dalam membayar pajak.

Saran Untuk Memperjuangkan Kepribadian Dalam Kebudayaan antara lain sebagai berikut:

- Melakukan transformasi mental-karakter dengan orientasi menumbuhkan manusia Indonesia yang berkarakter, kreatif, cakap tata kelola, dan berjiwa merdeka.

- Mengikis mentalitas feodalistik-kolonialistik-hedonistik dan mental budak (*inferiority complex*) dengan berani membuang nilai lama yang buruk, mempertahankan yang baik, dan mengupayakan nilai-nilai baru yang lebih baik, yang lebih sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
- Transformasi sosial berbasis Pancasila untuk memenuhi kebutuhan menciptakan pikiran-pikiran dan konsepsi-konsepsi teoretis dalam usaha membumikan nilai-nilai Pancasila secara obyektif.
- Menentang imperialisme kebudayaan dan pemerintah harus melindungi dan menjamin berkembangnya kebudayaan nasional, dengan memadukan kecemerlangan lokal (*local genius*) dan visi perkembangan global
- Usaha kebudayaan diarahkan terutama untuk membangun mentalitas kesetaraan, kemandirian, gotong royong, dengan etos kerja yang positif, amanah, dan ramah pelayanan dalam rangka mempertinggi mutu kemanusiaan, keadaban, dan persatuan
- Memperkuat wawasan Nusantara, dengan meluaskan horizon kebudayaan hingga meraih visi kemaritiman.
- Mengembangkan pembangunan berbasis modal kultural dengan menggalakkan budaya baca dan meneliti serta kreativitas inovasi masyarakat.
- Memberdayakan peran komunitas sebagai sokoguru pembangunan nilai (mental-kultural), terutama peran komunitas sekolah, komunitas agama, komunitas pemukiman, komunitas kerja, komunitas media, komunitas adat-budaya, komunitas organisasi kemasyarakatan, dan politik.
- Mengutamakan transformasi dunia pendidikan dengan orientasi mengembangkan manusia pembelajar yang berkarakter, kreatif, cakap tata kelola, dan berjiwa merdeka. (Yudi Latif: 2020, pp. 420-423).
- Terpenuhinya hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Daftar Pustaka

- Agus, AA (2016). *Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi*. Jurnal Office. 2(2): 229-238. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Aminullah. *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat*. Jurnal Ilmiah. 2 (1): 620-628. Mataram: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram.
- Arief, U. (2010). *Menciptakan Sistem Politik Berdasarkan Pancasila Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Nasional*. Jurnal Sosial Humaniorah. 3(2): 139-147. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Badan Pusat Statistik (2020), (2021). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2021 Meningkat Dibandingkan IPAK 2021.
- Badan Pusat Statistik (2022). Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2022
- Cholisin (2011). *Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Relevansinya dengan Kondisi Saat ini*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- DIREKTORAT PENGKAJIAN KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA KEDEPUTIAN BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA (2022). *Ekonomi Pancasila*

- Forbes (2021), World Bank dan Model Perhitungan MPI
- Gie, K. K. (2015). *Nasib Rakyat Indonesia Dalam Era Kemerdekaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harefa, A. (2012). *Pancasila sebagai Ideologi Dinamis*. Didaktik: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains, dan Pembelajarannya. 6(2): 879-891. Gunungsitoli: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gunungsitoli. Jurnal.
- Kaelan (2020). *Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotika Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kedaulatan Rakjat, Selasa 1 Juni 1964
- Latief, Y. (2019). *Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotika Hukum Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Latief, Y. (2020). *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan*. Jakarta: Mizan.
- liputan 6.com, 25 Maret 2021.
- Manurung, A.D.R. & Kanumuyoso, B. (2021). *Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi, dan Spiritualitas Bangsa*. Cetakan Pertama, Bekasi: Media Maxima.
- Moleong, L. J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
-
- Sakban, A. (2020). *Implementasi Nilai Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Seminar Nasional: Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Era Reformasi.
- Sudharmono (1995). *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka*. Jurnal Filsafat. 22: 1-10. Universitas Gajah Mada.
- Sutrisno (2016). *Peran Ideologi Pancasila Dalam Perkembangan Konstitusi dan Sistem Hukum di Indonesia*. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. 1(1): 41-49. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Udah, A. (2018). *Mempertegas Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa*. AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman. 8(1): 24-45. Tuban: STAI Al-Hikmah Tuban.
- Winters, J. A. (2021). *"Reflections on Oligarchy, Democracy, and the Rule of Law in Indonesia"*. Orasi Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 25 Februari 2021